KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF P. MOEKIYAT**
Jabatan : **Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOH. MAHFUD MD**
Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
MOH. MAHFUD MD	**ARIEF P. MOEKIYAT**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa
Tahun Anggaran : 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Kesatuan Bangsa lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Kesatuan Bangsa pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional.	65%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dalam dokumen perencanaan nasional.	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Kesatuan Bangsa yang ditindaklanjuti.	85%
Pelaksanaan Tugas Khusus Yang Optimal	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus.	100%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai Sakip	BB
	2. Nilai PMPRB	19
	3. Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi.	4
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi.	80

Jumlah Anggaran Program:

Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa: Rp. 14.748.224.000,- *(Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)*

Jakarta. Januari 2020

Menko Polhukam,

MOH. MAHFUD MD

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa,

ARIEF P. MOEKIYAT

Sasaran Strategis	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Kesatuan Bangsa Lintas Sektoral yang Efektif
Indikator Kinerja 1	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Kesatuan Bangsa pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional
Definisi	Indeks Kerukunan Umat Beragama yang disusun oleh Balitbang Diklat Kemenag dipandang sangat strategis dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga Deputi VI/Kesbang turut andil dalam upaya peningkatan skor Indeks Kerukunan Umat Beragama tersebut melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Formula: a. Rentang skor 1-100. b. Terdiri dari 3 variabel yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. c. Hipotesis penelitian ini adalah: Kerukunan terwujud melalui tingginya tingkat toleransi, kesetaraan dan kerjasama d. Survei digelar di 34 provinsi dengan sampel 100 orang per provinsi, menggunakan metode Multi Stage Clustered Random Sampling dengan margin error sebesar 1,2% dan tingkat kepercayaan 98,8%. Survey ini melibatkan 68 peneliti, 680 pembantu peneliti (enumerator) dan 3 orang spot checker per propinsi yang bertugas memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan survey.
Sumber Data	Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Cara Menghitung	$\Sigma = \frac{\text{jumlah capaian target IKUB}}{\text{target IKUB pada dokumen perencanaan nasional}} \times 100\%$
Definisi	Tersusunnya Konsep Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila dalam rangka Penyusunan Indeks Aktualisasi Pancasila yang disusun oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dipandang sangat strategis dalam pengambilan kebijakan guna mempekokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
Sumber Data	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Cara Menghitung	$\frac{\text{Jumlah Capaian Target Konsep GBHIP}}{\text{Target pada Dokumen Perencanaan Nasional}} \times 100\%$

Sasaran Strategis	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal
Indikator Kinerja 1	Nilai Sakip
Definisi	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian yang sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah. Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I yaitu: 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Internal 5. Capaian Kinerja
Sumber Data	Inspektorat Kemenko Polhukam
Cara Menghitung	Penilaian Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Kategori Penilaian : 1. AA (>90-100) 2. A (>80-90) 3. BB (>70-80) 4. B (>60-70) 5. CC (>50-60) 6. C (>30-50) 7. D (0-30)
Indikator Kinerja 2	Nilai PMPRB
Definisi	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, dengan Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (Proses), yaitu 1) Manajemen Perubahan; 2) Penataan Peraturan Perundang-undangan; 3) Penataan dan Penguatan Organisasi; 4) Penataan Tatalaksana; 5) Penguatan Pengawasan; 6) Penatan Sistem Manajemen SDM; 7) Penguatan AKuntabilitas Kinerja; dan 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sumber Data	Tim PMPRB
Cara Menghitung	Laporan Hasil PMPRB Unit Kerja Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa
Indikator Kinerja 3	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi
Definisi	Perencanaan kinerja merupakan proses dimana seluruh pegawai dimasing-masing unit untuk merencanakan apa yang harus dilakukan dalam satu tahun kedepan
Sumber Data	Penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja
Cara Menghitung	Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja dengan skala 1-100 terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu *50 poin untuk unsur perencanaan *50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan
Indikator Kinerja 4	Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi
Definisi	Kualitas pelayanan ini dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan tamu atau konsumen. Sedangkan tingkat kepuasan tamu ini sendiri dapat diperoleh dari perbandingan atas jenis pelayanan yang nyata diterima oleh konsumen dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh konsumen
Sumber Data	Penilaian berdasarkan Lembar Kerja Elektronik
Cara Menghitung	$\sum = \frac{\text{Indeks pada pelayanan PE} - \text{Indeks pada Pelayanan TUN}}{2}$

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa,

ARIEF R. MOEKIYAT